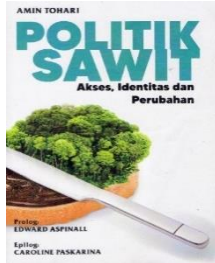


BOOK REVIEW  
**THE EXCLUSIVITY OF FARMERS IN THE OIL PALM  
INDUSTRY**



**Amin Tohari. *Politik Sawit: Akses, Identitas dan Perubahan*. Makassar: Carabaca, 2021. Pp: xx+196. ISBN: 978-623-95699-9-0.**

**Zamzam Muhammad Fuad**

Pusat Riset Politik – Badan Riset Inovasi Nasional

E-mail: zamz001@brin.go.id

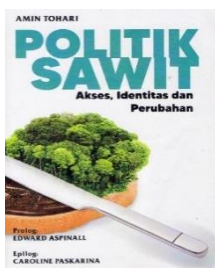
Received 15 September 2022 / Revised 4 November 2022 / Accepted 5 November 2022 /

Published Online 26 January 2022

DOI: <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2a7>

Register with CC BY NC SA License - Copyright © The Author(s), 2023.

## RESENSI BUKU EKSKLUSI PETANI DALAM INDUSTRI KELAPA SAWIT



Amin Tohari. *Politik Sawit: Akses, Identitas dan Perubahan*. Makassar: Carabaca, 2021. Halaman: xx+196. ISBN: 978-623-95699-9-0.

**Zamzam Muhammad Fuad**

Pusat Riset Politik – Badan Riset Inovasi Nasional

E-mail: zamz001@brin.go.id

### Pendahuluan

Dalam sebuah pidatonya, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sedang beruntung karena naiknya harga komoditas Indonesia di pasar internasional. Hal ini menyebabkan Indonesia berpotensi meraup pendapatan yang cukup besar. Komoditas yang dimaksud Sri Mulyani adalah minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO).<sup>1</sup> Namun di balik berita bahagia itu, ada juga kabar suram. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa telah terjadi peningkatan konflik agraria yang melibatkan petani dengan perusahaan negara dan swasta.

Dalam catatan KPA, pada 2019 terjadi konflik perkebunan berjumlah 87, yang meningkat menjadi 122 kasus pada 2020. Ternyata peningkatan konflik ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah lahan yang dibuka untuk perkebunan sawit. Dari tahun ke tahun, luas perkebunan kelapa sawit terus meningkat. Pada 2017 areal kebun kelapa sawit berjumlah 14 juta hektar, yang meningkat menjadi 15,1 juta hektar pada 2021.<sup>2</sup> Oleh karena itu, konflik yang semakin meningkat di sektor perkebunan akhirnya mesti dihubungkan dengan penetrasi pembukaan lahan untuk industri sawit. Artinya,

---

<sup>1</sup>Cantika Adinda Putri, “Sri Mulyani Happy, Target Pajak Tahun Ini Tembus Target Lagi” dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719193926-4-356853/sri-mulyani-happy-target-pajak-tahun-ini-tembus-target-lagi> diakses 1 September 2022.

<sup>2</sup>Lusia Arumingtyas, “Menanti Keseriusan Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria” dalam <https://www.mongabay.co.id/2021/01/27/menanti-keseriusan-pemerintah-selesaikan-konflik-agraria/> diakses 1 September 2022.

konflik harus dilihat dari kaca mata ekonomi politik. Untuk memahami persoalan itu, buku berjudul *Politik Sawit: Akses, Identitas dan Perubahan* yang ditulis oleh Amin Tohari signifikan untuk dijadikan rujukan.

## **Pembahasan**

Meskipun masih dalam kerangka ekonomi politik, Tohari membahas politik sawit dalam pemahaman yang sangat cair. Politik sawit tidak hanya tentang bagaimana proses pembentukan kebijakan perkelapa-sawitan oleh para aktor negara. Namun juga membahas bagaimana kelapa sawit telah mengubah diskursus pengelolaan lahan, menyerap banyak sekali aktor sekaligus mengubah relasi antar aktor.

Seluruh bab dalam buku *Politik Sawit* diarahkan untuk menjawab pertanyaan mulai dari bagaimana industri kelapa sawit mengubah *world view* masyarakat lokal memandang isu kepemilikan dan pengelolaan lahan? Bagaimana industri kelapa sawit mengubah identitas petani sawit? Bagaimana industri sawit memecah solidaritas dalam masyarakat? Bagaimana memahami konflik antar aktor yang saling terlibat dalam sirkuit industri kelapa sawit? Bagaimana para petani sawit dapat melawan hegemoni kelapa sawit? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang hendak dijawab dalam buku *Politik Sawit*.

Hal krusial yang diubah oleh industri kelapa sawit adalah sistem kepemilikan dan pengelolaan lahan. Secara historis dan sosiologis, terdapat 3 model rezim pengelolaan lahan, *beumo* (berhuma), *bekaret* (tanam karet) dan *besawit* (tanam sawit). Pada *beumo*, lahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan subsisten atau memenuhi kebutuhan sendiri. Tanaman keras digunakan bukan untuk menunjukkan klaim kepemilikan, melainkan untuk menandai bahwa lahan tersebut sedang digarap oleh seorang petani. Ketika kesuburan lahan menurun, petani berpindah mencari lahan baru untuk dibuka, dikelola dan dimanfaatkan hasilnya. Artinya, dalam *beumo*, penguasaan lahan ditandai dengan siapa yang terlebih dahulu membuka lahan. Sistem *beumo* ini diganjil oleh *bekaret* dan *besawit* yang mensyaratkan klaim kepemilikan lahan sebagai faktor yang penting dalam proses akumulasi profit.

Khusus untuk *besawit*, klaim kepemilikan ini menjadi semakin penting karena tanaman kelapa sawit baru akan panen 4 tahun setelah penanaman. Datangnya

perkebunan membuat *beumo* menjadi tidak relevan dari kacamata *besawit*. *Beumo* akhirnya dianggap praktik melawan hukum. Petani yang tadinya bisa mendapatkan lahan dari klaim “siapa yang pertama kali membuka/menggarap lahan”, mulai kehilangan lahan, atau paling baik nasibnya adalah menyerahkan lahannya untuk mengikuti program petani plasma.<sup>3</sup> Dengan kata lain, *besawit* tidak hanya modus perampasan tanah, namun penarikan identitas petani ke dalam sistem kapitalisme yang eksploitatif dan predatoris.

Tohari juga menunjukkan bagaimana industri sawit mengubah identitas petani. Dalam hal ini industri sawit berhasil mencabut identitas petani. Pencabutan identitas ini terkait dengan dicabutnya dua hak petani, yaitu hak properti dan hak akses. Seorang petani yang memiliki klaim atas properti tanah, belum tentu memiliki akses memanfaatkan tanahnya secara bebas. Hal ini terlihat dari kasus para petani plasma yang berhasil mengklaim tanah namun tidak berhak menanami tanahnya secara bebas. Sebaliknya ada juga petani yang memiliki akses namun tidak memiliki klaim kepemilikan seperti dalam kasus tanah adat.<sup>4</sup>

Masalah kepemilikan dan masalah akses ini yang menciptakan identitas petani yang beragam, mulai dari kepentingan yang berbeda hingga impian dan cita-cita yang berbeda. Oleh karena itu, konflik yang terjadi biasanya bertahan sebentar dan tidak menggalang aspirasi petani secara luas. Tanpa ada pembentukan identitas kolektif, tidak akan ada gerakan yang efektif melawan oligarki kapitalis.

Namun bukan berarti perkebunan sawit itu raksasa yang tidak terkalahkan. Selalu ada celah untuk melawan perkebunan sawit. Di sini Tohari menawarkan strategi penggalangan identitas dan kepentingan petani untuk melakukan aksi perlawanan terhadap perkebunan sawit yang eksploitatif. Tohari mengidentifikasi batas-batas atau kelemahan industri sawit. Misalnya, perluasan lahan kelapa sawit yang ugal-ugalan telah merusak ekosistem alam sehingga mengundang kecaman dari kaum environmentalis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Amin Tohari, *Politik Sawit: Akses, Identitas dan Perubahan* (Makassar: Carabaca, 2021), h. 61-91.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 13-17.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 50-56.

Perluasan lahan juga menggerus petani dari berbagai macam latar sehingga memunculkan aksi protes di mana-mana. Di momen-momen ini petani dapat mendefinisikan kembali identitasnya, menegosiasikan dan memperjuangkan kepentingannya bersama dengan kaum environmentalis. Dilihat secara parsial isu konservasi menolak intervensi manusia mengekstrak lahan demi sumber daya alam. Namun para environmentalis juga membutuhkan dukungan banyak pihak untuk menyukseskan agendanya. Petani dan environmentalis dapat menegosiasikan kepentingan masing-masing seperti memasifkan isu pertanian skala kecil atau pertanian organik.

Selain itu, Tohari juga menegaskan bahwa kasus pembakaran perkebunan dan pendudukan hutan oleh masyarakat di Jambi dapat dijadikan contoh aliansi gerakan masyarakat sipil melawan perkebunan. Kasus itu merupakan akumulasi kegagalan perusahaan sawit dalam memenuhi hak adat, pencaplokan lahan hingga ketidakadilan redistribusi pendapatan. Kelemahan ini dimaknai Tohari sebagai celah yang sebenarnya bisa dimasuki oleh berbagai kepentingan untuk melawan atau membatasi kuasa perkebunan yang predatoris.<sup>6</sup> Menurut Tohari, sebenarnya tidak ada ditemui masyarakat yang menolak komoditas tanaman sawit secara total.<sup>7</sup> Terkait hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Li juga menunjukkan bahwa sudah sejak lama, didorong oleh kolonialisme, masyarakat pedalaman mulai menanam sesuatu yang menguntungkan dan diperlukan oleh pasar.<sup>8</sup> Insting mencari untung inilah, menurut Tohari, bisa jadi arena untuk menegosiasikan kepentingan.

Namun ada juga etnis masyarakat yang memang cenderung menolak sawit seluruhnya. Pertanyaannya, mengapa ada etnis masyarakat yang menolak atau menerima sawit?. Tohari mengidentifikasi ini bisa terjadi karena perbedaan sejarah pemerolehan lahan pada masing-masing etnis. Etnis Bugis, misalnya, pada tahun 70-an datang ke Kalimantan Timur sebagai pendatang dan memiliki keahlian bertanam cokelat, yang saat harganya memang sedang meroket. Oleh karena itu orang Bugis cenderung terlebih dahulu dapat mengakumulasi tanah dan kapital untuk menanam

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 36-59.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 29.

<sup>8</sup>Tania Murray Li, *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2022), h. 23-24.

sawit secara mandiri, atau ikut dalam pertanian plasma sawit. Orang Jawa juga diuntungkan karena mendapatkan jatah tanah dari pemerintah bonus dari keikutsertaan dalam program transmigrasi. Masyarakat lokal yang tidak memiliki klaim atas tanah akhirnya menjadi pekerja serabutan di perkebunan. Tohari juga menggunakan pendekatan Weber dalam menganalisis persoalan ini. Ia menemukan bahwa agama tertentu, seperti Katolik, cenderung menolak penanaman kelapa sawit daripada agama lain. Orang beragama Kristen Protestan dan Orang Bugis yang mayoritas Islam cenderung menerima penanaman kelapa sawit.<sup>9</sup>

Secara umum, buku Politik Sawit ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit telah mengeksklusi petani sawit sehingga menimbulkan protes di mana-mana. Meskipun sulit, aksi melawan perkebunan ini bukan tidak mungkin dilakukan. Aksi protes ini dapat terjadi ketika petani melakukan aliansi identitas dan menegosiasikan kepentingannya dengan masyarakat yang lain.

Salah satu kekuatan buku Politik Sawit ini pada analisis identitas petani yang diuraikan cukup detail. Secara umum buku ini menolak asumsi identitas petani yang tunggal. Hal ini seperti pendapat Iqra Anugrah yang menyarankan bahwa sudah saatnya masyarakat meninggalkan pandangan romantik yang menggambarkan petani sebagai identitas homogen dan penuh kerukunan.<sup>10</sup> Menurut Tohari, setiap tanaman industri (karet, coklat, kelapa sawit, dll.) dapat menciptakan identitas yang berbeda-beda di kalangan petani. Bahkan etnis dan agama juga dapat menimbulkan identitas petani yang berbeda-beda. Identitas yang beragam ini membuat konflik tidak bisa dipahami secara hitam putih, misal antara perusahaan vs petani.

Pendapat Tohari yang anti esensialisme dalam memandang identitas petani juga sejalan dengan penelusuran etnografis yang dilakukan oleh Li dan Semedi. Menurut Li dan Semedi industri sawit telah menciptakan kelas masyarakat yang sangat beragam. Identitas petani, misalnya, terdiferensiasi dalam berbagai kategori yang tidak cukup direpresentasikan sebagai petani pemilik lahan dan buruh tani belaka. Namun lebih dari itu terdapat tumpukan identitas lain seperti petani transmigran, petani asli, petani Melayu, petani Dayak, dll., yang masing-masing memiliki kepentingan dan artikulasi

---

<sup>9</sup>Amin Tohari, *Op. Cit.*, h. 92-123.

<sup>10</sup>Iqra Anugrah, "Persoalan Agraria dan Demokrasi di Indonesia" dalam *Prisma*, Vol. 38, No. 3 (2019), h. 8.

berbeda-beda terhadap perusahaan sawit.<sup>11</sup> Perbedaan ini bisa menyebabkan aliansi antar petani menjadi sulit dan berliku-liku. Kurangnya kepekaan akan keberagaman identitas petani membuat pemerintah, peneliti atau LSM kesulitan membuat kebijakan atau menginisiasi gerakan sosial. Kajian tentang identitas petani dapat digunakan untuk memahami mengapa jarang ada gerakan petani yang solid dan relatif permanen untuk melawan kepentingan perkebunan yang eksploitatif dan predatoris.

Meskipun buku Politik Sawit sudah mengusung kesadaran bahwa identitas petani tidak tunggal, namun ada dua hal yang absen dalam buku Politik Sawit ini. *Pertama*, tiadanya analisis kelas yang mendalam dalam mengurai identitas petani. Buku Politik Sawit lebih memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih eklektik dalam menganalisis konflik. Misal ketika menjelaskan tentang potensi konflik antar kelompok masyarakat. Buku tersebut menyebutkan bahwa di Desa Long Bentuk,<sup>12</sup> mayoritas orang beragama Katolik cenderung menolak eksistensi perusahaan sawit daripada orang beragama Islam atau Kristen Protestan.<sup>13</sup> Persoalannya adalah apakah faktor agama yang mempengaruhi pilihan politik petani terhadap sawit ini juga berlaku di lokasi lain?. Kalau memang di lokasi lain ternyata agama tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap pilihan politik petani, maka dibutuhkan pendekatan lain daripada menggunakan pendekatan Weberian dalam menganalisis identitas dan konflik petani. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi politik dengan analisis kelas dapat diusulkan.

Mengadaptasi pemikiran Bernstein, analisis kelas dapat digunakan untuk mengurai identitas petani dengan mengajukan pertanyaan “siapa memiliki apa?”, “siapa melakukan apa?”, “siapa mendapatkan apa?” dan “digunakan untuk apa hasil yang didapatkan?”<sup>14</sup> Dengan mengajukan pertanyaan itu, maka dapat ditemukan berbagai kategori identitas petani berdasarkan kelas sosialnya.

“Siapa memiliki apa” dapat menjawab diferensiasi identitas petani berdasarkan kepemilikan alat produksi. Apakah seorang petani memiliki lahan untuk ditanami sawit?, Kalau punya, berapa hektar yang dia punya?. Apakah petani itu punya modal

---

<sup>11</sup>Tania Murray Li dan Pujo Semedi, *Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2022), h. 206-263.

<sup>12</sup>Desa di Kecamatan Busang, Kalimantan Timur.

<sup>13</sup>Amin Tohari, *Op. Cit.*, h. 108-121.

<sup>14</sup>Henry Bernstein, *Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria* (Yogyakarta: INSISTPress, 2019), h. 30-32.

atau kapital untuk mengolah lahan, mendapatkan bibit, membeli pupuk atau pemberantas hama?. “Siapa melakukan apa” berkaitan dengan pembagian kerja di perkebunan, seperti siapa yang menyediakan modal, siapa yang menjadi pekerja, siapa yang mengolah buah sawit, dll. “Siapa mendapatkan apa” terkait dengan pembagian profit atau keuntungan, seperti siapa yang mendapat jatah profit paling besar atau paling sedikit. “Digunakan untuk apa hasilnya” mencerminkan derajat kapitalisme dalam suatu institusi sosial. Seluruh pertanyaan ini akhirnya dapat menjawab pertanyaan penting dalam pendekatan ekonomi politik: bagaimana relasi kuasa antar aktor dalam industri sawit, atau persisnya, siapa yang mengeksploitasi siapa?.

Membawa analisis kelas untuk mengurai identitas petani sudah dilakukan oleh Li dan Semedi. Dalam penelusuran etnografinya Li dan Semedi mengidentifikasi beragamnya identitas petani mulai dari petani yang hanya memiliki satu petak hektar lahan sampai yang memiliki puluhan hektar lahan. Cara petani mendapatkan lahan juga sangat berkaitan dengan pola relasi kuasa petani dengan aktor pemerintah, penguasa modal dan elit perkebunan. Pembagian kerja tercermin dari hubungan antara petani pemilik lahan dengan petani pekerja nir lahan, atau antara petani dengan petugas penjaga kebun, atau antara petani dengan pegawai penyortir buah sawit.<sup>15</sup> Semua hubungan itu mencerminkan relasi kuasa yang timpang. Dengan kata lain, kepemilikan alat produksi yang timpang sangat menentukan keseimbangan relasi kuasa sehingga menghasilkan medan antagonisme atau konflik.

Tanpa adanya analisis kelas, wajar jika kemudian buku Politik Sawit menganjurkan adanya aliansi populer antara petani dengan kelompok yang dirugikan dengan kehadiran perkebunan, misalnya masyarakat adat dan aktivis perkotaan (aktivis lingkungan). Asumsinya, aliansi dapat terjadi karena kelompok sosial itu sama-sama memiliki musuh bersama yaitu perkebunan. Aliansi populer semacam ini pada dasarnya memang bisa menciptakan aksi-aksi yang menghambat penetrasi perkebunan, seperti pendudukan lahan, blokade jalur distribusi sawit, pembakaran pabrik, dll. Namun aliansi populer tidak akan dapat memperjuangkan isu *landreform* secara konsisten (isu yang anehnya kurang mendapat ulasan yang memadai di buku ini).

---

<sup>15</sup>Tania Murray Li dan Pujo Semedi, *Op.Cit.*, h. 53-101.



*Kedua*, buku Politik Sawit belum membahas secara mendalam bagaimana sistem oligarki beroperasi dalam industri sawit. Pada salah satu bab buku Politik Sawit memang sempat disinggung bagaimana para elit pemerintahan, Awang Faroek, berperan dalam perluasan lahan sawit. Namun mengandaikan hanya ada satu aktor dominan dalam pembukaan puluhan ribu hektar lahan adalah hal yang sulit dipercaya. Oleh karena itu, konsep tentang oligarki dapat melengkapi kerangka analisis. Dengan membawa argumen Vedi Hadiz tentang oligarki, maka dapat diajukan suatu argumentasi bahwa kebijakan dibentuk oleh kontestasi berbagai kepentingan sosial yang mencerminkan bagaimana kekuasaan didistribusikan.<sup>16</sup> Melalui pendekatan itulah aliansi antara pejabat tinggi di tingkat nasional dan lokal, partai politik, pengusaha, aparat, militer, dan aktor politik lainnya dapat dianalisis.

Dengan konsep oligarki dimasukkan dalam kerangka analisis, akhirnya dapat diungkap bagaimana sifat negara (dalam hal ini pemerintah daerah); Apakah ia adalah perwujudan dari pertarungan sosial (pendekatan pluralis)?; Apakah ia adalah perwujudan dari kelas kapitalis (pendekatan marxisme) atau apakah ia adalah kekuatan politik mandiri yang tunduk pada kekuatan bisnis (*state captured*)?. Pada akhirnya, ada atau tidaknya konflik antara perkebunan dan petani harus dibaca dalam kerangka ini. Tanpa adanya analisis oligarki dalam industri perkebunan, maka kekalahan petani dalam melawan kepentingan perkebunan sulit dijelaskan. Dengan menggunakan konsep oligarki dapat terbaca apakah kelompok masyarakat berada di luar jaringan ini atau ikut masuk terinkorporasi ke dalam struktur jaringan oligarki.

## Penutup

Buku Politik Sawit merupakan sumbangan yang baik dalam perkembangan ilmu politik di Indonesia. Buku ini tidak hanya melihat kelapa sawit dalam kerangka untung rugi ekonomi. Sawit juga tidak cukup dipahami sebagai sumber kesejahteraan atau penyumbang devisa negara. Lebih dari itu, buku Politik Sawit berhasil melanjutkan suatu diskursus politik agraria yang menjadikan sawit sebagai medan pertarungan kepentingan antar berbagai aktor. Buku Politik Sawit menunjukkan bahwa, lagi-lagi,

---

<sup>16</sup>Vedi Hadiz, *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pasca Otoritarianisme* (Jakarta: KPG, 2022), h. 40.

petani adalah sasaran eksploitasi dari sistem agraria yang pro pada pengusaha bermodal besar. Oleh karena itu, buku ini bisa dijadikan referensi bagi para akademisi yang menekuni bidang kajian politik agraria. Selain itu, para pengampu kebijakan juga dapat menggunakan buku ini untuk merumuskan kebijakan industri sawit yang berkeadilan untuk para petani sawit.

### DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, Iqra. "Persoalan Agraria dan Demokrasi di Indonesia" dalam *Prisma*, Vol. 38, No. 3 (2019), h. 3-16.

Bernstein, Henry. *Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria*. Yogyakarta: INSISTPress, 2019.

Hadiz, Vedi. *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pasca Otoritarianisme*. Jakarta: KPG, 2022.

Li, Tania Murray dan Pujo Semedi. *Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2022.

Li, Tania Murray. *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2022.

Tohari, Amin. *Politik Sawit: Akses, Identitas dan Perubahan*. Makassar: Carabaca, 2021.

### Website

Arumingtyas, Lusya. "Menanti Keseriusan Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria" dalam <https://www.mongabay.co.id/2021/01/27/menanti-keseriusan-pemerintah-selesaikan-konflik-agraria/> diakses 1 September 2022.

Putri, Cantika Adinda. "Sri Mulyani Happy, Target Pajak Tahun Ini Tembus Target Lagi" dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719193926-4-356853/sri-mulyani-happy-target-pajak-tahun-ini-tembus-target-lagi> diakses 1 September 2022.